

Vol. XVI, No. 2, Juli - Desember 2019

ISSN: 1693-9867 (p); 2527-5119 (e)

AL-A'RAF

Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat

AL-A'RAF

Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat

Editorial Team:

Editor in-Chief

Islah Gusmian, IAIN Surakarta

Editorial Board

Mahrus eL-Mawa, Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta

Media Zainul Bahri, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga

M. Endy Saputro, IAIN Surakarta

Nashruddin Baidan, IAIN Surakarta

Managing Editor

Nur Kafid, IAIN Surakarta

Editor

Subkhani Kusuma Dewi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Yuyun Sunesti, UNS Solo

Editorial Assistant

Nur Rohman, IAIN Surakarta

Siti Fathonah, IAIN Surakarta

Reviewer

M. Faisol Fatawai, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang

Abad Badruzzaman, IAIN Tulung Agung

Fadhli Lukman, Universität Freiburg, Germany

Ahmad Fawaid Sjadzili, IAIN Madura

Ahmad Fuad Fanani, University of Toronto, Canada

Jajang A Rohmana, UIN Sunan Gunung Djati

Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, UIN Ar-Raniry-Banda Aceh

Alamat Redaksi:

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta.

Jl. Pandawa No. 1, Pucangan, Kartasura, Jawa Tengah, 57168

Phone: +62271-781516, Fax: +62271-782774.

e-mail: jurnal.alaraf@gmail.com

web: <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-araf>

AL-A'RAF

Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat

Tabel of Content

Kepentingan Politik Masyumi dalam Tafsir Annur Karya Tengku Muhammad Hasbi Ashshiddieq Abd. Rahman, Suci Wulandari	137
Paradigma Fisika Qur'ani dalam Tridharma Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Muslimah Susilayati, Mufiq, Barid Syamsiyah	161
Pemikiran Politik Islamisme Moderat Aljam'iyatul Washliyah Ja'far	191
Kritik Ibn Warraq Atas Orientalisme Edward Said: Perdebatan Epistemologis Mengenai 'Timur dan Barat' Media Zainul Bahri	223
Naturalisme-Teistik Abu Bakar Alrazi Isfaroh	247
Soekarno dan Argumen Teologis-Filosofis dalam Pemikiran Islam Imam Sukardi	267
Pluralisme Asimetris: Pluralitas dan Gerakan Sosial Masyarakat Indonesia Kontemporer Muhammad Abzar Duraesa, Muzayyin Ahyar	287
Indeks Penulis	311
<i>Author Guideline</i>	312

PLURALISME ASIMETRIS: PLURALITAS DAN GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA KONTEMPORER

Muhammad Abzar Duraesa

Institut Agama Islam Negeri Samarinda

Muzayyin Ahyar

Institut Agama Islam Negeri Samarinda

Keywords:

Plurality,
Asymmetrical
pluralism,
Diversity in
Indonesia

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk melihat kondisi keberagaman masyarakat Indonesia dalam kaitannya dengan wacana pluralisme. Dari hasil kerja lapangan yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia: Samarinda, Manado, dan Jakarta, sebagai representasi daerah dengan keberagaman yang dinamis, dengan pendekatan sosiologi-politik, hasil studi menunjukkan bahwa kondisi masyarakat Indonesia yang beragam menghadirkan wacana pluralisme yang asimetris; pluralitas berbasis kondisi sosial dan fenomena yang berbeda antara satu daerah dan daerah lain, satu komunitas dan komunitas lain dan satu kasus ke kasus yang lain. Konsep pluralisme bukan hanya sebuah konsep yang lahir karena keragaman agama dan tidak selalu membentuk perilaku masyarakat dalam menghadapi keragaman. Sebaliknya, keragaman masyarakatlah yang akan memperkaya konsep pluralisme menjadi pluralisme etnik, agama, dan pandangan politik.

Abstract

This study aims to look at the diversity condition of Indonesian society related to the discourse of pluralism. Based on the fieldwork conducted from several regions in Indonesia; Samarinda, Manado, and Jakarta which is considered as representative regions in term of its dynamic diversity, by using a socio-political approach, the results of this study show that the condition of diversity in Indonesian society constitutes an asymmetrical discourse of pluralism; a plurality based on social

conditions and phenomena that differ from one region to another, one community to another, and one case to another. The concept of pluralism does not merely a notion that emerge because of religious diversity and does not always shape people's behavior in facing diversity. On the contrary, the diversity of Indonesian society will enrich the concept of pluralism to be an ethnic, religious, and political pluralism.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, sekaligus dengan banyak suku, budaya, aliran kepercayaan, dan ideologi politik. Dalam sejarahnya, Indonesia dikenal sebagai negara dengan beragam bangsa yang sepakat untuk bersatu. Persatuan ini dikenal melalui beberapa faslalah bangsa Indonesia, seperti *Bhinneka Tunggal Ika* yang menjadi motto Indonesia. Kondisi sosiologis ini mendapat perhatian yang cukup serius dari para sarjana untuk terus mengkaji tentang di Indonesia. Oleh karena itu, puluhan bahkan ratusan sarjana telah melakukan observasi mendalam tentang wacana pluralisme di Indonesia.

Pluralisme pada dasarnya mengelilingi kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri, manusia hidup dengan jutaan perbedaan; etika, filosofis, agama, warna kulit dan kepercayaan kultural lainnya. Jika dilihat dari kondisi keragaman ini, maka pluralisme bukanlah hal baru dalam sejarah manusia. Pluralisme adalah kenyataan sejarah yang diteorisasikan, diwacanakan, dan diindoktrinasikan kepada masyarakat luas oleh para ilmuwan sosial yang dianggap otoritatif. Dalam perkembangannya, pluralisme menjadi bagian dari bermacam-macam bidang studi, mulai dari filsafat, linguistik, antropologi, ideologi politik, hingga pemikiran keagamaan.

Sampai saat ini, pluralisme agama menjadi salah satu konsep yang masih relevan untuk diperbincangkan dalam berbagai forum. Diskursus tentang pluralisme agama ini mendapat respon secara beragam dan kritis dari beberapa sarjana di berbagai forum. Sebagian kalangan mendukung

konsep ini untuk dihadirkan dalam pemikiran keagamaan, sementara sebagian kalangan lain menunjukkan kekhawatiran atas implikasi yang akan muncul dari diskursus tersebut.¹

Pada awalnya, pluralisme merupakan terminologi filsafat yang berkembang di Barat. Terminologi ini hadir dari sebuah *ontological question* mengenai “yang ada”. Terdapat empat (4) aliran yang dapat dikaji sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut; monisme, dualisme, pluralisme, dan agnotisisme.² Selanjutnya, diteorisasikan menjadi pemikiran tentang kebenaran yang tidak hanya dapat diperoleh dari satu sumber yang baku dan rigid, melainkan juga berasal dari berbagai sumber yang bersifat plural lainnya. Pandangan ini dipopulerkan sejak awal oleh Leibniz dan Russe, filsuf Jerman dan Inggris. Di Inggris, pluralisme semakin populer pada awal Abad ke-20 melalui beberapa tokoh, seperti F. Maitland, S. G. Hobson, Harold Laski, R. H. Tawney dan GDH Cole.³

Dalam melihat fenomena aliran keagamaan, perspektif pluralisme melahirkan paling tidak, tiga (3) argumentasi logis. *Pertama*, kebenaran nisbi dari setiap aliran (agama). *Kedua*, kebenaran yang diakui memiliki nilai yang setara, tidak ada penilaian superior maupun inferior satu terhadap lainnya. *Ketiga*, aliran keagamaan harus diperlakukan sebagai entitas eksistensial mandiri secara filosofis dan harus memiliki sistem nilai sendiri yang dapat dihadirkan dalam pelbagai bentuk dan tradisi. Artinya, suatu aliran keagamaan tidak dapat direduksi dan dipersatukan dengan aliran lainnya, dan tidak satupun aliran keagamaan yang boleh menegasikan aliran yang lain.⁴

¹ Adian Husaini, *Pluralisme Agama Haram: Fatwa MUI yang Tegas & tidak Kontroversial* (Pustaka al-Kautsar, 2005).

² M. Zainuddin, *Filsafat Ilmu: Perspektif Pemikiran Islam* (Lintas Pustaka, 2006).

³ Muhyar Fanani, “Mewujudkan Dunia Damai: Studi atas Sejarah Ide Pluralisme Agama dan Nasionalisme di Barat,” *Ijtihad* (2003).

⁴ M.M Billah, “Pluralitas Agama di Indonesia: Memilih Kerangka Pemahaman atas Keberadaan Aliran Keagamaan dari Perspektif Teologi dan HAM,” *Makalah Konferensi UIN Malang*, 2007.

Pluralisme dapat pula didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana eksistensi kelompok dalam sebuah masyarakat yang memiliki perbedaan prinsip, baik dari segi suku, budaya, dan agama. Dapat disimplifikasikan bahwa pluralisme adalah suatu keanekaragaman dalam sebuah komunitas.⁵ Makna dan definisinya pluralisme, selalu diletakkan sebagai sebuah aliran yang dapat membentuk perilaku keagamaan masyarakat menjadi lebih toleran. Dalam pernyataan yang *visè versa*, alih-alih memupuk jiwa toleransi, pluralisme justru dianggap menjadi ‘perusak’ keimanan dan kepercayaan. Bagi para pendukung maupun penolaknya, pluralismu selalu menjadi subjek dalam pembahasan perilaku keberagaman, yang mana objeknya adalah manusia. Para pengusung ide pluralisme selalu ingin menanamkan nilai-nilainya kepada masyarakat luas sebagai doktrin kebenaran menyikapi keragaman. Sebaliknya, penolaknya ingin menjauhkan pluralisme sebagai subjek pemikiran dari masyarakat luas. Pertanyaan yang sering muncul terkait konsep pluralisme dan perilaku masyarakat adalah ‘bagaimana argumen pluralisme agama membentuk perilaku masyarakat untuk hidup bersama dalam keragaman?’ Pertanyaan ini menjadi rancu ketika disentuh dengan fenomena masyarakat akar rumput. Pluralisme adalah istilah akademis yang tidak semua orang mengetahui konsepnya secara detail. Sementara masyarakat hidup dalam keragaman kultural yang terkadang tidak tahu-menahu tentang konsep akademik. Pertanyaan akademik dalam studi ini akan dibalik menjadi “bagaimana kehidupan masyarakat membentuk argumen/wacana pluralisme agama?”

Studi ini menempatkan Indonesia sebagai basis wadah keragaman untuk dikaji. Indonesia tercipta dengan kondisi geografis yang menunjang keberagaman. Secara sosiologis, Indonesia memiliki banyak perbedaan etnis, suku, bahasa, dan pemikiran keagamaan. Dengan mengambil beberapa contoh perkumpulan berbasis etnis, agama, pengalaman tokoh agama, dan beberapa fenomena sosial-politik lainnya, studi ini menganalisis

⁵ Victoria Neufeldt, “Webster’s New World College Dictionary” (USA: Micmillan, 1996).

sejauh mana kondisi pluralitas dapat menjadi wacana pluralisme agama. Terdapat empat (4) gerakan sosial berbasis etnis dan kesukuan, dua (2) gerakan mengangkat tema perdamaian dan keragaman, dan satu (1) gerakan sosial berjilid-jilid yang tendensius kepada isu-isu sosial-politik. Data yang diperoleh dari studi lapangan di Samarinda, Manado, dan Jakarta, sebagai representasi daerah dengan keberagaman yang dinamis, dengan pendekatan sosiologi-politik, dianalisis secara induktif, dengan tujuan memperkaya studi tentang pluralisme dan keberagaman masyarakat Indonesia.

Perdebatan atas Pluralisme

Penyebaran ide-ide pluralisme di Indonesia sudah ada sejak jaman kolonialisasi yang ditandai dengan merebaknya ajaran kelompok *Theosofi* di awal tahun 1900-an yang memiliki nilai-nilai tentang universalitas manusia, persamaan ras, aliran, dan agama.⁶ Namun, istilah pluralisme agama dan pengakuan sebagai individu pluralis dapat ditelusuri dari beberapa catatan Ahmad Wahib.⁷ Meskipun jauh sebelum itu, nilai-nilai pluralismu yang menghargai perbedaan, menjauhkan *truth claim*, dan meminimalisir pendapat mengenai kebenaran absolut telah ditunjukkan dalam tradisi Nahdhatul Ulama (NU). Kiai Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, dan Gusdur misalnya, telah berhasil membawa Nahdhatul Ulama mengenal pluralismu secara praktis.⁸

Beberapa tahun setelahnya, Ulil Abshar Abdalla, memandang bahwa semua agama memiliki esensi yang sama, semuanya mengajarkan untuk menuju jalan kebenaran. Pendapat ini kemudian berimplikasi kepada masalah hukum perkawinan lintas agama. Dalam artikelnya, Ulil

⁶ Iskandar P Nugraha, *Theosofi, Nasionalisme dan Elite Modern Indonesia*. (Depok: Komunitas Bambu, 2011).

⁷ Wahib Wahib, *Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib* (Jakarta: LP3ES, 2003).

⁸ Greg Barton, *Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President* (UNSW Press, 2002).

menegaskan bahwa larangan pernikahan beda agama bisa jadi sudah tidak relevan lagi dalam hubungan sosial modern.⁹ Ulil memiliki argumen pluralisme yang objektif dan seimbang antara konsep pluralisme di Barat (sesuai pengalamannya hidup di Amerika), dengan konsep pluralisme dan kebebasan beragama yang idealnya diimplementasikan. Dalam salah satu kutipan wawancara dengan Ulil, Jeremy Menchik menggarisbawahi, bahwa Ulil setuju dengan konsep pluralisme yang mengangkat kebebasan beragama, agar masyarakat memiliki hak dalam mengeksplorasi perbedaan sistem kepercayaan di negaranya. Ulil tidak setuju dengan monopoli hak dalam pembangunan rumah ibadah yang mengarah pada “imperialisme”.¹⁰

M. Alwi Shihab, menyatakan bahwa ada prinsip yang ditegaskan oleh Alqur’an terkait pengakuan terhadap eksistensi orang-orang yang berbuat baik dalam komunitas agama, yang boleh jadi seseorang akan memperoleh pahala dari Tuhan. Argumen ini memperkuat ide mengenai pluralisme agama, sekaligus menentang eksklusivisme dalam beragama. Dalam makna yang lain, eksklusivisme agama tidak sesuai dengan spirit Alqur’an. Sebab Alqur’an tidak membedakan satu agama dengan agama lainnya.¹¹

Sementara Nurcholish Madjid, berpendapat bahwa ada tiga (3) sikap dalam merespon perbedaan agama. *Pertama*, sikap eksklusif dalam memandang agama lain, meyakini bahwa agama lain adalah jalan yang salah dan menyesatkan. *Kedua* sikap inklusif, meyakini bahwa agama-agama lain adalah bentuk lain dari kepercayaan yang kita imani. *Ketiga*, sikap pluralis yang terekspresi dalam berbagai macam pernyataan. Misalnya, agama-agama lain adalah jalan yang juga otoritatif untuk mencapai kebenaran yang sama. Menurut Nurcholis, Islam adalah agama inklusif dan memungkinkan untuk ditafsirkan ke arah yang semakin

⁹ Ulil Abshar Abdalla, “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam,” *Harian Kompas*, November 2002, 18 edition.

¹⁰ Jeremy Menchik, *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism* (Cambridge University Press, 2016), 2.2016

¹¹ M. Alwi Shihab, *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1997), 109.

plural. Dalam konteks filsafat Perennial, setiap agama pada dasarnya adalah ekspresi kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang sama. Sehingga pluralisme adalah *sunnatullah* yang tidak akan berubah, dan tidak mungkin untuk diingkari.¹² Gagasan ini telah mempengaruhi banyak Sarjana dan aktifis dalam mempromosikan pluralisme. Kondisi sosial keagamaan sebelum fatwa MUI tentang haramnya pluralisme dipengaruhi oleh berbagai Sarjana dan aktifis tersebut. Mereka mengampanyekan pluralisme melalui ceramah akademik di kampus dan organisasi non-pemerintah, seperti Jaringan Islam Liberal (JIL), *International Center for Islam and Pluralism* (ICIP), dan *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP), dan Indonesian Committee on Religion and Peace (ICoMRP).

Tokoh lain yang juga memiliki ide tentang pluralisme adalah Budhy Munawar-Rachman. Dia mewacanakan teologi pluralis, dan berpendapat bahwa konsep teologi pluralis memberikan kebenaran yang universal untuk berbagai agama; bahwa penganut agama apapun pantas disebut sebagai “orang beriman”. Menurutnya, yang diperlukan saat ini dalam penghayatan pluralism antar-agama adalah pandangan bahwa siapa pun yang beriman—tanpa harus melihat apa agamanya—adalah sama di hadapan Allah, karena Tuhan kita semua adalah Tuhan yang Maha Satu”.¹³ Abdul Munir Mulkhan berpendapat, “jika semua agama memang benar sendiri, penting diyakini bahwa surga Tuhan yang satu itu terdiri dari banyak pintu dan kamar. Tiap pintu adalah jalan bagi setiap pemeluk agama untuk memasukinya. Syaratnya adalah keikhlasan pembebasan manusia dari kelaparan, penderitaan, kekerasan, dan ketakutan tanpa melihat agamanya.”¹⁴ dari sinilah kerja sama dan dialog pemeluk berbeda agama menjadi mungkin untuk dilakukan.

¹² Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1999).

¹³ Budhy Munawar-Rachman, “Basis Teologi Persaudaraan Antar-Agama,” *Islamlib*, last modified August 7, 2001, accessed January 31, 2020, <http://islamlib.com/gagasan/pluralisme/basis-teologi-persaudaraan-antar-agama/>.

¹⁴ Abdul Munir Mulkhan, *Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar* (Kreasi Wacana, 2001).

Menurut hemat penulis, dalam merespon pandangan tersebut, umat Islam secara umum terbagi ke dalam dua (2) aliran besar; *pertama*, pluralisme agama dianggap sebagai suatu keniscayaan, fitrah manusiawi, dan *summatullah*, sehingga pluralisme agama tidak dapat dielakkan, bahkan harus diimani dan disosialisasikan kepada seluruh pemeluk agama yang berbeda. Dalam pemaknaan inilah, yang dimaksudkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI), nomor: 7/MUNAS-VII/MUI/II/2005 tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme Agama. Fatwa tersebut menyatakan bahwa paham ini bertentangan dengan ajaran Islam dan haram bagi kaum Muslim untuk mengakui, meyakini, dan mengikutinya.¹⁵ *Kedua*, pluralitas agama sebagai kondisi di mana berbagai agama mewujud (eksis) secara bersamaan dalam suatu negara/masyarakat. Pluralisme agama dalam konteks ini adalah sebuah konsep interaksi antar berbagai pemeluk agama yang berbeda, tanpa saling mengganggu keyakinan/aqidah masing-masing, serta tidak pula mencampurkan keyakinan agama-agama yang berbeda.

Namun demikian, wacana pluralisme juga banyak ditentang oleh akademisi. Adian Husaini misalnya, merespon keras gagasan pluralisme agama dengan menyatakan bahwa gagasan utama dari paham pluralisme agama, atau liberalisme Islam adalah semua agama sama. Menurutnya, dalam paham pluralisme agama diyakini semua agama menuju kepada jalan kebenaran.

Pluralisme dan Kondisi Pluralitas

Jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, menjadi penanda babak baru perpolitikan Indonesia. Sistem pemerintahan orritarianisme berubah menjadi demokratis, yang memberikan kesempatan bagi berbagai kelompok untuk lebih bebas mengekspresikan pandangan mereka tentang

¹⁵ Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI), nomor 7/MUNAS-VII?MUI?II/2005.

ekonomi, sosial, dan politik. Sebagai masa transisi demokrasi, dekade awal pasca Reformasi menjadi hal penting bagi pembentukan masyarakat. Pada masa inilah berbagai dengan beragam ideologi tumbuh subur; keagamaan, filsafat, kesukuan, profesi dan lain sebagainya. Dalam kondisi ini pula, pluralisme menyebar sebagai konsekuensi dari kondisi liberal yang menyertai demokratisasi. Kalangan demokrat-liberalis berusaha mengambil ruang publik dengan membentuk perkumpulan berbasis ideologi politik liberal. Jaringan Islam Liberal dan beberapa organisasi sejenis lainnya terbentuk untuk mengusung ide-ide liberalis dan pluralis. Sementara kalangan agamis memanfaatkan momentum ini untuk mengonsolidasikan kekuatan demi mereligiuskan masyarakat, menurut cara mereka masing-masing. Tidak ketinggalan, berbagai masyarakat adat pun menginstitutionalisasikan diri ke dalam organisasi sosial kemasyarakatan. Ekspresi kebebasan ini juga terlihat dalam berbagai bentuk gerakan sosial yang terus berproliferasi hingga saat ini. Gerakan-gerakan ini terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Khususnya di daerah yang keberagamannya sangat dinamis, seperti Samarinda, Manado, dan Jakarta.

Pluralitas Etnis dan Politik Identitas di Samarinda

Heterogenitas dalam sebuah wilayah tidak jarang membawa masyarakat kepada konflik dengan isu etnis. Beberapa contoh diantaranya adalah konflik dengan isu etnis di Kalimantan Tengah, antara Dayak dan Madura; ketegangan sosial di Kalimantan Barat, antara Melayu dan Madura; termasuk kasus isu etnis, pribumi dan non-pribumi, yang terjadi pada masa Pilkada DKI Jakarta pada 2016; dan beberapa konflik bernuansa etnis di Samarinda. Fenomena konflik tersebut terkadang luput dari media nasional, sehingga dianggap tidak pernah terjadi. Padahal, isu etnisitas jelas tergambar di Samarinda, Kalimantan Timur dengan adanya organisasi masyarakat berdasarkan etnis; Jawa, Bugis, Dayak, Banjar, dan Madura. Seperti Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS),

Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur (KBBKT), Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi (IKAPAKARTI), Persekutuan Dayak Kalimantan Timur. Gepak (gerakan pemuda asli Kalimantan).

Organisasi sosial kemasyarakatan, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), merupakan suatu organisasi etnis yang menjadi penampung aspirasi dan ide-ide konstruktif masyarakat Sulawesi Selatan, yang tinggal di luar Sulawesi Selatan. KKSS dideklarasikan pada 12 November 1976 di Hotel Marannu Jakarta. Orientasinya untuk membangun solidaritas warga Sulawesi Selatan yang berada di perantauan. Organisasi ini bersifat kekeluargaan dan berperan aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan daerah Sulawesi Selatan.¹⁶

Bubuhan Banjar adalah penduduk asli Provinsi Borneo yang tersebar diseluruh wilayah Borneo (sekarang wilayah Kalimantan, termasuk kresidenan Kalimantan Timur). Bubuhan Banjar disebut pula sebagai penduduk asli Pulau Kalimantan Timur bersama warga Dayak, Kutai, Paser, Tidung, dan yang lainnya. Sebagai penduduk asli Kalimantan Timur, Bubuhan Banjar berkewajiban, ikut bertanggung jawab dan berperan aktif dalam proses pembangunan di Kalimantan Timur bersama dengan kelompok penduduk etnis lainnya dalam mewujudkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan wilayah Kalimantan Timur, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kebersamaan, kesetaraan, hak azasi manusia, pemeliharaan lingkungan hidup.¹⁷ Bubuhan Banjar Kalimantan Timur sepakat berhimpun dalam suatu wadah organisasi yang bersifat permanen dan menjadi kekuatan moral yang diberi nama Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur disingkat (KBBKT), yang dulu bernama “Kerukunan Keluarga Kalimantan Selatan” (K3S). Berdasarkan hasil Musyawarah Daerah pada tanggal 30 Juni 2001 di kota Samarinda, K3S dilebur menjadi KBBKT.

¹⁶ Diajeng Laily Hidayati, “Faktor-Faktor Berdirinya Organisasi Kemasyarakatan Berbasis Etnis di Kalimantan Timur” (Skripsi, IAIN Samarinda, 2013).

¹⁷ Ahmad Jubaedi, S.Sos (Sekretars Umum KBBKT), Wawancara tanggal 3 Agustus 2012

Bagi masyarakat Jawa, Ikapakarti adalah adalah himpunan warga Jawa yang berdiri pada 27 Desember 2003. Saat itu, 35 paguyuban warga Jawa melebur menjadi satu wadah. Ini terjadi berkat peran dua pendirinya; Sunaryo (*alm*) dan Anwar Chanani, yang selalu menyerukan semangat persatuan warga Jawa di Kalimantan Timur. Tujuan awal pembentukan perhimpunan ini adalah untuk menaungi seluruh warga Jawa agar tidak terkotak-kotak, sehingga menjadi kekuatan besar dan sinergis untuk mendorong pembangunan wilayah Kalimantan Timur. Munculnya organisasi ini dilandasi oleh keinginan luhur untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Jawa khususnya, dan masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya, serta sebagai tali pengikat, wadah penampung aspirasi dan perjuangan seluruh warga keluarga tanah Jawi yang ada di Kalimantan Timur.¹⁸

Gepak (Gerakan Pemuda Asli Kalimantan) didirikan pada bulan Oktober 2001 di Hotel Mesra, Jl. Pahlawan Samarinda Kalimantan Timur. Saat itu, para pemuda asli Kalimantan belum memiliki sebuah wadah.¹⁹ Beberapa organisasi kesukuan pada saat itu lebih bersifat khusus kesukuan tertentu saja, seperti Kesultanan Kutai, Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur, dan Persukutuan Dayak Kalimantan Timur. Berkat dorongan dari Majelis Ulama Indonesia, yang saat itu dipimpin oleh KH. Sabrani, maka didirikanlah suatu organisasi yang menaungi seluruh suku asli Kalimantan, sehingga berdirilah Gepak.

Selain itu, konflik antar etnis yang terjadi di Kalimantan Tengah juga menjadi salah satu faktor pendorong terbentuknya Gepak. Mengingat situasi saat itu diperlukan organisasi yang mampu mengendalikan pemuda Kalimantan agar tidak memperkeruh suasana. Mengingat, tingginya ketimpangan antara Sumber Daya Manusia (SDM) pendatang dan penduduk lokal dengan kondisi melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA),

¹⁸ HM. Agus Soetopo (Ketua Umum IKAPAKARTI), Wawancara tanggal 3 September 2012

¹⁹ Hamdani HB (Ketua IV), Wawancara Tanggal 13 Juli 2012

maka dirasa sangat penting membentuk wadah yang dapat meningkatkan kemampuan pemuda asli Kalimantan. Gepak ini berbeda dengan organisasi etnis dengan isu pemeliharaan tradisi, kearifan lokal, warisan leluhur, dan kesenian dari sebuah budaya etnis tertentu, seperti Forum Betawi Rempug (FBR) yang beranggotakan mono-etnis. Gepak bersifat poly-etnis, yang mengonsolidasikan keanggotaan untuk suku Banjar, Dayak, dan Kutai secara konvergen. Isu yang digaungkan adalah suku asli dan suku pendatang. Suku asli atau pribumi adalah tuan rumah yang lebih mengetahui kondisi rumah, sekaligus lebih berhak dan berwewenang atas rumah tersebut. Gerakan ini lahir, sebagai respon atas adanya rasa ketidakadilan akibat keteringgalan masyarakat “pribumi” dibanding pendatang yang bergerak dinamis.

Menyadari ketimpangan tersebut, penduduk asli pun merasa terancam secara ekonomi dan politik. Sebagai responnya, melalui Gepak ini masyarakat pribumi mengonsolidasikan kekuatan dengan mengangkat isu etnisitas dan masyarakat peribumi. Gambaran rasa itu dapat dilihat dari pandangan salah satu informan yang membidani lahirnya gerakan ini:

“Memang kita sadari, Gepak ini lahir sebagai reaksi atas keterbelakangan masyarakat lokal, kita ndak mau jadi penonton di daerah kita sendiri, misalnya ketika kita lihat pertambangan itu tumbuh pesat di Kalimantan khususnya di Samarinda ini, berapa orang kita yang menduduki jabatan penting di perusahaan itu?”²⁰

Selain itu, informan lain mengatakan:

“Kita (para pendiri Gepak) ini ingin mengangkat harkat martabat suku asli Kalimantan, mengangkat harkat martabat ini diartikan bahwa bagaimana kita mendapat porsi dan tempat di wilayah pemerintahan dan ekonomi. Memang waktu itu kita akui putera asli Kalimantan itu jarang yang menduduki tempat Pemerintahan.”²¹

²⁰ Wawancara dengan salah satu informan pendiri Gepak pada tanggal 13 November 2018

²¹ Wawancara dengan salah satu informan pendiri Gepak pada tanggal 17 November 2018

Pandangan di atas, setidaknya dapat dibaca bahwa gerakan etnis yang memunculkan identitasnya diakibatkan oleh adanya perasaan terancam, setidaknya dalam tiga (3) ruang; ekonomi, politik, dan budaya. Salah satu cara untuk mengonsolidasikan kekuatan politik kulturalnya adalah dengan konvergensi beberapa masyarakat yang merupakan suku asli pulau Kalimantan.

Dalam bidang politik, pada masa Pemilihan Gubernur Kalimantan pada tahun 2008, Gepak sangat gencar mengonsolidasikan kekuatannya dengan membentuk Dewan Pengurus Cabang di wilayah Kalimantan Timur. Gepak mulai mengembangkan kekuatan dari warga lokal bersama dengan suku-suku kecil, seperti Pasir dan Tidung untuk terlibat aktif mendukung pasangan Awang Faruk-Farid Wajdi sebagai putera daerah yang diunggulkan. Sementara dalam bidang ekonomi, Gepak selalu dilibatkan oleh para investor tambang, baik sebagai konsultan perusahaan maupun fasilitator keamanan. Selain menggaungkan isu-isu pemeliharaan tradisi, kearifan lokal, warisan leluhur dan kesenian, anggota Gepak berkumpul secara kolektif dengan mewacanakan penjagaan sumber daya alam di pulau Kalimantan, dan mendorong warga pribumi untuk tampil di wilayah pemerintahan yang strategis dengan mengangkat sentimen primordial.

Fenomena ini dapat dilihat sebagai sesuatu perubahan untuk menunjukkan proses demokratisasi muncul ke permukaan. Mengingat, pada era Orde Baru keharmonisan yang dibangun dari segi suku, adat, agama, penduduk asli atau pendatang dan jenis keragaman lainnya berupa kamufase semata. Karena kran partisipasi masyarakat justru dibatasi melalui kanal resmi negara. Masyarakat hanya dijadikan sebagai mesin yang bergerak melalui satu tombol kontrol (masyarakat mekanis).²²

²² Ernest Gellner, *Nations and Nationalism* (Cornell University Press, 2008). provocative . . . a great book.\”—New Statesman \”An important book . . . It is a new starting line from which all subsequent discussions of nationalism will have to begin.\”—New Society \”A better explanation than anyone has yet offered of why nationalism is such a prominent principle of political legitimacy today. This is a terse and forceful work . . . the product of great intellectual energy and an impressive range of knowledge.\”—

Momentum Reformasi inilah yang menjadi penyulut bagi para pemegang identitas tertentu untuk bersuara, agar identitasnya diketahui dan layak dipertimbangkan.

Agama, Perdamaian dan Gerakan Sosial di Manado

Manado adalah Ibu Kota dari provinsi Sulawesi Utara. Di kota ini terdapat banyak komunitas yang menyuarakan perdamaian lintas agama, seperti Komunitas Bela Indonesia (KBI), Komunitas Lintas Iman, dan beberapa komunitas lain. Perkumpulan keagamaan di Manado memiliki peran penting dalam mendukung perdamaian, pluralisme beragama, dan penghargaan terhadap perbedaan yang ada. Di antara komunitas yang aktif dan rutin mengadakan acara adalah *Interfaith New Generation Initiative and Engagement* (iNGAGE), dan Gerakan Cinta Damai Sulawesi Utara (GCDS). iNGAGE adalah komunitas yang terbentuk di Yogyakarta atas kerja sama tiga (3) universitas; Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan Universitas Kristen Duta Wacana. Manado terpilih menjadi Kota percontohan untuk aktifitas lintas iman oleh iNGAGE.

Sementara GCDS adalah gerakan yang terbentuk dari berbagai komunitas saat menyikapi kasus Bom di Gereja Samarinda pada akhir tahun 2016. Setelah peristiwa itulah beberapa aktifis keagamaan di Manado

Times Literary Supplement \”Periodically, an important book emerges that makes us, through the uniqueness of its theory, perceive history as we have not seen it before. Ernest Gellner has written such a volume. Students of nationalism will have to come to grips with his interpretation of the causes for the emergence of nationalism, since he has declared that most of the previous explanations are largely mythical.\”—American Historical Review First published in 1983, *Nations and Nationalism* remains one of the most influential explanations of the emergence of nationalism ever written. This updated edition of Ernest Gellner’s now-canonical work includes a new introductory essay from John Breuilly, tracing the way the field has evolved over the past two decades, and a bibliography of important work on nationalism since 1983.”, “ISBN”:”978-0-8014-7500-9”, “language”:”en”, “note”:”Google-Books-ID: XPHpUSUAsFOC”, “number-of-pages”:”210”, “publisher”:”Cornell University Press”, “source”:”Google Books”, “title”:”Nations and Nationalism”, “author”:[{“family”:”Gellner”, “given”:”Ernest”}], “issued”:[{“date-parts”:[[“2008”]]}], “schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”}

mengorganisasi diri untuk menunjukkan aksi simpati. Saat ini, GCDS terus aktif mempromosikan kegiatan lintas agama kepada para masyarakat luas di Manado. Gerakan ini meraih perhatian masyarakat luas melalui berbagai kegiatatan kontemplatif tentang perdamaian di Indonesia. Gerakan ini mengajak para elit politik dan pejabat publik untuk ikut mengampanyekan perdamaian dalam setiap kegiatan politik, ataupun tugas kenegaraan.

Aksi Bela Islam

Pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) memicu aksi Bela Islam berjilid-jilid di penghujung tahun 2016 hingga tahun 2018. Peristiwa ini berawal dari pidato Ahok saat kunjungan kerja dan sosialisasi program pemerintah Provinsi ke pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta 27 September 2016. Pidato tersebut menjadi hangat diperbincangkan setelah Buni Yani mengunggah rekaman video acara tersebut, dengan disertai komentar bahwa video tersebut telah menghina Alqur'an sebagai kitab suci umat Islam. Video tersebut disebar melalui berbagai media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Line dan lain sebagainya. Walhasil, video tersebut menyulut amarah sebagian masyarakat Muslim, yang terlihat dari berbagai postingan kemarahan, baik berupa gambar, photo, status, maupun komentar. Rentetan aksi demonstrasi mengikuti pun muncul. Pertengahan Oktober tahun 2016, sekelompok massa berkumpul di depan Balai Kota DKI Jakarta untuk melakukan protes atas pernyataan Ahok yang dinilai menghina umat Islam. Hingga berlanjut pada aksi 4 November 2016, 2 Desember 2016, 21 Februari 2017, 3 Maret 2017, dan 5 Mei 2017 dengan massa yang lebih besar.

Jika dilihat dari proses terbentuknya gerakan Aksi Bela Islam ini, terdapat pola aksi yang dapat disebut sebagai gerakan sosial. Pola tersebut berawal dari sebuah propaganda aksi melalui layar dari gawai teknologi, komentar pendukung propaganda, dan berujung pada mobilisasi massa riil

demis sebuah tujuan. Aksi ini diklaim dihadiri oleh jutaan penduduk dari seluruh Indonesia. Namun di tengah tumpah ruahnya manusia di Jakarta, aksi tersebut tidak mendapat dukungan resmi dari dua organisasi besar di Indonesia; Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Kedua organisasi ini seolah kehilangan otoritasnya sebagai lembaga yang membentuk sikap dan tindakan keberagaman Muslim di Indonesia. Aksi Bela Islam ini mengindikasikan adanya tren pertumbuhan otoritas baru yang mampu mengarahkan tindakan masyarakat Muslim Indonesia, selain Muhammadiyah dan NU.²³

Berbagai kajian mengemukakan, bahwa Aksi Bela Islam terkait erat dengan momen politik. Greg Fealey menganggap Aksi Bela Islam dalam kasus Ahok sebagai suatu *set-back* bagi keberagaman politik di Indonesia. Aksi Bela Islam hadir untuk membangkitkan kembali pertarungan primordialisme dan identitas; antara “native” dan “non-native” untuk mengedepankan posisi istimewa mereka di tengah kalangan Muslim lain sebagai mayoritas, dan menganggap memiliki otoritas atas perpolitikan Indonesia. Terlebih, Aksi Bela Islam dilakukan menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Peristiwa ini memberikan konsekuensi serius bagi masyarakat Indonesia; untuk memikirkan ulang atas klaimnya sebagai Negara Muslim demokrasi yang moderat.²⁴

Aksi Bela Islam sebenarnya mampu menunjukkan bagaimana nuansa pluralistik terbentuk, karena momen politik praktis. Di masa Aksi Bela Islam, ada tokoh non-Muslim ikut hadir menaiki panggung yang disediakan para aktor aksi bela Islam. Rocky Gerung misalnya, mendapat kehormatan untuk tampil di media sosial sebagai kritikus terhadap program

²³ Muzayyin Ahyar, “Islamic Clicktivism: Internet, Democracy and Contemporary Islamist Activism in Surakarta,” *Studia Islamika* vol 24, no. 3 (December 31, 2017): 435–468.

²⁴ Greg Fealey, “Bigger than Ahok: Explaining the 2 December Mass Rally,” *Indonesia at Melbourne*, last modified December 7, 2016, accessed March 29, 2017, <http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/bigger-than-ahok-explaining-jakartas-2-december-mass-rally/>.

pemerintah. Arif Puyono, kader partai Gerindra pun mendukung aksi ini secara politis. Di beberapa media sosial, tersebar berbagai foto warga non-Muslim memberikan testimoni terkait Aksi Bela Islam yang belangsung damai.²⁵ Bahkan, panitia acara reuni Aksi Bela Islam 212 mempersilahkan warga non-Muslim untuk ikut datang dan mendukung Aksi Bela Islam.

Apa yang Berbeda dari Pluralisme di Indonesia?

Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam merawat pluralitas sejak awal kemerdekaan. Fenomena politik, pluralitas agama, dan kesukuan menjadi pemantik awal tumbuhnya wacana pluralisme dengan berbagai bentuk gerakan sosial. Gerakan sosial, baik yang berbasis agama, kesukuan, maupun ideologi politik inilah yang menjadi karakteristik pluralisme di Indonesia. Pluralisme di Indonesia tidak hanya dalam hal agama, tetapi terbentuk dari berbagai fenomena masyarakat. Karena itulah pluralisme di Indonesia bersifat asimetris; kondisi pluralitas yang berbeda-beda sehingga melahirkan diskursus pluralisme berbeda-beda pula. Sebagaimana kondisi polarisasi keagamaan (khususnya Islam) pada masyarakat Indonesia yang disebabkan bukan hanya karena pertemuan antara Islam dan non-Muslim, tetapi juga antara kalangan puritan dan santri,²⁶ pluralisme di Indonesia juga terbentuk bukan hanya karena persinggungan antar agama, melainkan juga antar etnis, kebudayaan, dan ideologi politik. Inilah salah satu kondisi pluralitas di Indonesia yang mampu membentuk wacana pluralisme secara asimetris.

²⁵ Rakyatku News, "Ikut Reuni 212 di Monas, Pria Nonmuslim ini Usul Jadi Libur Nasional," *Rakyatku News*, last modified December 4, 2018, accessed January 31, 2020, <http://news.rakyatku.com/read/130219/2018/12/04/ikut-reuni-212-di-monas-pria-nonmuslim-ini-usul-jadi-libur-nasional>; "Ini Alasan Tokoh Tionghoa Lieus Sungkharisma Dukung Ijtima Ulama III," *Riaumandiri*, accessed January 31, 2020, <https://www.riau mandiri.id/read/detail/69899/ini-alasan-tokoh-tionghoa-lieus-sungkharisma-dukung-ijtima-ulama-iii>.

²⁶ Carool Kersten, *History of Islam in Indonesia: Unity in Diversity* (Edinburgh University Press, 2017).

Dalam filsafat dialektika, pluralisme adalah suatu perjalanan sejarah, dan gejala keniscayaan alamiah. Segala sesuatu berada dalam proses dialektik; segala sesuatu saling berhubungan dan senantiasa mengalami perubahan yang terjadi melalui proses falsifikasi dari beberapa hal yang berbeda, bertentangan, ataupun berlawanan berupa *theses*, *antitheses*, dan *syntheses*.²⁷ Dengan kata lain, segala sesuatu selalu berada pada proses differensiasi, kontradiksi, dan rekonsiliasi. Jadi, pluralisme adalah sebuah proses sejarah yang tidak akan berhenti, selama proses sejarah itu masih berjalan.²⁸

Sementara, dalam perspektif filsafat perennial, pluralisme terletak pada dimensi eksoteris, yaitu pada ranah pemahaman, pemikiran, interpretasi, inspirasi, dan simbol yang semuanya berada dalam lingkup ruang dan waktu. Dalam pandangan ini, kebenaran absolut tidak terbagi, hanya satu esensi. Dari yang satu inilah terpancar pelbagai “kebenaran”. Sebagaimana matahari yang secara niscaya memancarkan cahayanya; hakikat cahaya adalah satu dan tanpa warna, tetapi spektrum kilatan cahayanya ditangkap oleh mata manusia dalam kesan yang beraneka ragam.²⁹

Dengan pengalaman di bawah rezim otoriter yang lebih panjang, Indonesia seakan tidak mampu beralih menjadi negara demokratis. Pertanyaan yang relevan untuk kondisi ini adalah; meskipun tanpa menggaungkan wacana pluralisme, mampukah Indonesia, sebagai negara heterogen, mengelola masyarakat plural? Banyak Sarjana mengklaim bahwa Indonesia adalah negara yang sukses dalam mengelola pluralitas. Perubahan rezim dan beberapa peraturan di membawa pengaruh yang kuat terhadap identitas keagamaan dan relasi antar agama. Beberapa kasus

²⁷ Louis Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, terj. Soejono Sumargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992).

²⁸ Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2* (Yogyakarta: Kanisius, 1980).

²⁹ Komaruddin Hidayat and Muhammad W Nafis, *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial* (Jakarta: Paramadina, 1995).

yang terlihat untuk menguatkan tesis ini adalah meningkatnya nasionalisme etnik-religius dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah. Identitas ini bukan menunjukkan eksklusifitas nasionalisme etnik-religius, tetapi justru menguatkan relasi antar etnik sebagai negara, dengan beragam etnis di dalamnya. Sekilas, di era demokrasi saat ini banyak bermunculan kabar tentang jejak hitam hubungan antar agama atau etnis, seperti penolakan pendirian rumah ibadah, konflik etnis, dan lain sebagainya, yang kemudian menimbulkan anggapan seolah terjadi kontestasi negatif; “kalau mereka melarang gereja didirikan, kami juga akan melarang masjid untuk dibangun”. Padahal, kasus hubungan antar-agama tidak harus dilihat secara simplistik seperti ini. Usaha perdamaian demi hubungan baik lintas identitas harus dilihat dalam tradisi panjang yang terus dilaksanakan hingga saat ini. Seperti tradisi penghormatan antar agama di beberapa daerah.³⁰

Lene Pederson menggarisbawahi, bahwa prasyarat terjaganya konsep pluralisme adalah dengan lebih dulu menerapkan demokrasi. Demokrasi dianggap sebagai langkah terbaik meskipun politis— untuk membuka keran kebebasan di suatu negara. Demokrasi diyakini membuka berbagai kanal yang tertutup. Sehingga pasca demokratisasi di suatu negeri akan berdampak pada ragam identitas yang hadir di ruang publik yang bebas (*free public sphere*). Ide dan wacana untuk menjaga ragam identitas itulah yang diyakini sejalan dengan konsep pluralisme.³¹ Namun, beberapa kajian mengatakan, ada semacam “*pluralism by default*”; pluralisme yang terbangun di beberapa daerah tanpa prasyarat demokrasi. Sebagai contoh, negara-negara di kawasan bekas kekuasaan Uni Soviet, seperti Belarus, Moldova, dan Ukraina. Ketiga negara tersebut pada dasarnya mengalami kompetisi rezim politik yang tinggi; dengan media yang terbuka, badan legislasi yang kuat, dan transfer kekuasaan yang demokratis. Namun 20 tahun setelahnya, semua keadaan berubah terbalik.

³⁰ Lene Pederson, “Religious Pluralism in Indonesia,” *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 17, no. 5 (2016): 387–398.

³¹ Peter Lassman, *Pluralism* (John Wiley & Sons, 2013).

Lucan Way menjelaskan situasi tersebut secara detail. Mengapa pluralisme dapat berkembang meskipun di negara otoritarian. Menurutnya, terdapat dua (2) faktor kunci; *pertama*, kondisi politik memang dapat memfasilitasi tumbuh kembangnya wacana pluralisme dengan tujuan yang politis pula; mengancam kekuasaan petahana dengan mengikis pengikutnya yang monolitik. *Kedua*, perpecahan identitas di lingkup internal penguasa akan dimanfaatkan oleh pihak luar/oposisi untuk memobilisasi dukungan dengan menghargai semua identitas yang ada. Di sinilah pluralisme akan berkembang.³²

Sementara Jeremy Menchik mengatakan, toleransi memiliki makna yang tidak tunggal. Sumber toleransi bukan sebagaimana yang para Sarjana singgung; *liberal democracy*. Tesis Menchik ini seolah bernada “sarkastik”. Ia membahas kondisi demokrasi di Indonesia yang dijalankan masyarakat Muslim Indonesia. Indonesia mampu mengelola toleransi, meski bukan berbasis liberalisme, sebagaimana Amerika. Meskipun Indonesia menggaungkan toleransi, negara ini tidak lantas memiliki karakter nasionalisme yang membebaskan, seperti Amerika yang menerapkan demokrasi liberal. Indonesia mampu menerapkan toleransi tanpa lebih dulu mengalami fase liberalisme yang ekstrem. Dengan Pancasila (sila Ketuhanan), Undang-Undang kebebasan beragama, dan pengakuan terhadap enam (6) agama resmi, nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme berlandaskan ketuhanan. Toleransi bukan dari falsafah liberalisme murni, melainkan lebih banyak dari ragam interpretasi keagamaan.³³

³² Lucan Way, *Pluralism by Default* (Meryland: John Hopkins University Press, 2015).

³³ Menchik, *Islam and Democracy in Indonesia*; Jeremy Menchik, “Productive Intolerance: Godly Nationalism in Indonesia,” *Comparative Studies in Society and History* 56, no. 3 (July 2014): 591–621. Productive Intolerance: Godly Nationalism in Indonesia, *Comparative Studies in Society and History* 56, no. 3 (July 2014)

Memang, pada saat yang sama gerakan sosial keagamaan eksklusif juga banyak bermunculan seiring dengan runtuhnya rezim Orde Baru.³⁴ Para aktor gerakan keagamaan Islam eksklusif tersebut, sebenarnya hanya ikut memanfaatkan momentum politik sebagai selebrasi euphoria kedatangan demokrasi. Kemunculan mereka bukan tidak lantas menguatkan pendapat, bahwa kondisi pluralisme di Indonesia semakin melemah. Gerakan tersebut, terbukti belum dan tidak pernah memenangkan panggung demokrasi dan merebut ruang publik masyarakat Muslim yang luas. Sebaliknya, gerakan tersebut justru semakin terfragmentasi dengan meluasnya kepentingan para aktornya. Sebagai contoh, gerakan Islamis di Solo³⁵ yang terus berubah nama, bentuk³⁶ dan arah gerakan perjuangan.³⁷ Contoh lainnya seperti gerakan 212, yang banyak dimotori oleh aktor Front Pembela Islam (FPI) yang mengalami fragmentasi menjadi beberapa kubu. Gerakan semacam ini memang tampak di permukaan, namun belum mampu mengambil alih gerakan Islam mainstream di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama.³⁸

³⁴ Martin van Bruinessen, *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn"* (Institute of Southeast Asian Studies, 2013).

³⁵ Nur Kafid, "Dari Islamisme Ke 'Premanisme': Pergeseran Orientasi Gerakan Kelompok Islam Radikal Di Era Desentralisasi Demokrasi 1," *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 21, no. 1 (2016): 57–79, <http://journal.ui.ac.id/index.php/mjs/article/view/4737>.

³⁶ Nur Kafid, "Political Clientelism as the Way of Survival of Radical Islamic Group Movement in Cianjur, West Java," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, no. 1 (2018): 67–93.

³⁷ Muhammad Abzar Duraesa and Muzayyin Ahyar, "Reproliferation of Islamist Movement in Surakarta: Trajectory and Strategy in The Post Democratization Indonesia," *DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (December 19, 2019): 201.

³⁸ Najib Burhani, *Plural Islam and Contestation of Religious Authority In Indonesia*, 2018, accessed July 18, 2019, https://www.academia.edu/36865699/Plural_Islam_and_contestation_of_religious_authority_In_Indonesia.

Penutup

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, kondisi sosial-politik di Indonesia semakin mengukuhkan bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat pluralitas tinggi. Buktinya, berragam gerakan sosial berbasis identitas tumbuh subur. Kehadiran gerakan-gerakan sosial ini tidak hanya membuktikan bahwa demokratisasi terjadi dan berlangsung dengan baik, tetapi juga menegaskan wujud diskursus pluralisme yang lahir karena faktor kondisi sosial-politik. Konsep pluralisme bukan hanya sebuah konsep yang lahir karena keragaman agama. Konsep pluralisme tidak selalu membentuk perilaku masyarakat dalam menghadapi keragaman. Sebaliknya, keragaman masyarakat yang akan membentuk dan memperkaya konsep pluralisme menjadi pluralisme etnik, agama, dan pandangan politik.

Referensi

- Abdalla, Ulil Abshar. “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam.” *Harian Kompas*, November 2002, 18 edition.
- Ahyar, Muzayyin. “Islamic Clicktivism: Internet, Democracy and Contemporary Islamist Activism in Surakarta.” *Studia Islamika* vol 24, no. 3 (December 31, 2017): 435–468.
- Barton, Greg. *Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President*. UNSW Press, 2002.
- Billah, M.M. “Pluralitas Agama di Indonesia: Memilih Kerangka Pemahaman atas Keberadaan Aliran Keagamaan dari Perspektif Teologi dan HAM.” *Makalah Konferensi UIN Malang*, 2007.
- Bruinessen, Martin van. *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the “Conservative Turn.”* Institute of Southeast Asian Studies, 2013.
- Burhani, Najib. *Plural Islam and Contestation of Religious Authority In Indonesia*, 2018. Accessed July 18, 2019. https://www.academia.edu/36865699/Plural_Islam_and_contestation_of_religious_

authority_In_Indonesia.

- Duraesa, Muhammad Abzar, and Muzayyin Ahyar. "Reproliferation of Islamist Movement in Surakarta: Trajectory and Strategy in The Post Democratization Indonesia." *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (December 19, 2019): 201.
- Fanani, Muhyar. "Mewujudkan Dunia Damai: Studi atas Sejarah Ide Pluralisme Agama dan Nasionalisme di Barat." *Ijtihad* (2003).
- Fealy, Greg. "Bigger than Ahok: Explaining the 2 December Mass Rally." *Indonesia at Melbourne*. Last modified December 7, 2016. Accessed March 29, 2017. <http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/bigger-than-ahok-explaining-jakartas-2-december-mass-rally/>.
- Gellner, Ernest. *Nations and Nationalism*. Cornell University Press, 2008.
- Hadiwijono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius, 1980.
- Hidayat, Komaruddin, and Muhammad W Nafis. *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Hidayati, Diajeng Laily. "Faktor-Faktor Berdirinya Organisasi Kemasyarakatan Berbasis Etnis di Kalimantan Timur." Skripsi, IAIN Samarinda, 2013.
- Husaini, Adian. *Pluralisme Agama: Haram: Fatwa MUI yang Tegas & tidak Kontroversial*. Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Kattsoff, Louis. *Pengantar Filsafat*, terj. Soejono Sumargono. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Kafid, Nur. "Dari Islamisme Ke 'Premanisme': Pergeseran Orientasi Gerakan Kelompok Islam Radikal Di Era Desentralisasi Demokrasi 1," *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 21, no. 1 (2016): 57–79, <http://journal.ui.ac.id/index.php/mjs/article/view/4737>.
- _____. "Political Clientelism as the Way of Survival of Radical Islamic Group Movement in Cianjur, West Java," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, no. 1 (2018): 67–93.
- Kersten, Carool. *History of Islam in Indonesia: Unity in Diversity*. Edinburgh University Press, 2017.
- Lassman, Peter. *Pluralism*. John Wiley & Sons, 2013.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1999.

- Menchik, Jeremy. *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*. Cambridge University Press, 2016.
- . “Productive Intolerance: Godly Nationalism in Indonesia.” *Comparative Studies in Society and History* 56, no. 3 (July 2014): 591–621.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar*. Kreasi Wacana, 2001.
- Munawar-Rachman, Budhy. “Basis Teologi Persaudaraan Antar-Agama.” *Islamlib*. Last modified August 7, 2001. Accessed January 31, 2020. <http://islamlib.com/gagasan/pluralisme/basis-teologi-persaudaraan-antar-agama/>.
- Neufeldt, Victoria. “Webster’s New World College Dictionary.” USA: Micmillan, 1996.
- News, Rakyatku. “Ikut Reuni 212 di Monas, Pria Nonmuslim Ini Usul Jadi Libur Nasional.” *Rakyatku News*. Last modified December 4, 2018. Accessed January 31, 2020. <http://news.rakyatku.com/read/130219/2018/12/04/ikut-reuni-212-di-monas-pria-nonmuslim-ini-usul-jadi-libur-nasional>.
- Nugraha, Iskandar P. *Theosoft, Nasionalisme dan Elite Modern Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu, 2011.
- Pederson, Lene. “Religious Pluralism in Indonesia.” *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 17, no. 5 (2016): 387–398.
- Shihab, M. Alwi. *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1997.
- Wahib, Wahib. *Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib*. Jakarta: LP3ES, 2003.
- Way, Lucan. *Pluralism by Default*. Maryland: John Hopkins University Press, 2015.
- Zainuddin, M. *Filsafat Ilmu: Perspektif Pemikiran Islam*. Lintas Pustaka, 2006.
- “Ini Alasan Tokoh Tionghoa Lieus Sungkharisma Dukung Ijtima Ulama III.” *Riaumandiri*. Accessed January 31, 2020. <https://www.riaumandiri.id/read/detail/69899/ini-alasan-tokoh-tionghoa-lieus-sungkharisma-dukung-ijtima-ulama-iii>.